

**PENGARUH KOORDINASI TERHADAP EFEKTIVITAS
PENERTIBAN BANGUNAN DAN PEMUKIMAN LIAR DI
KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR**

***THE EFFECT OF COORDINATION ON THE EFFECTIVENESS OF
WILD BUILDING AND SETTLEMENT IN KECAMATAN CIBINONG,
BOGOR DISTRICT***

Indra Iriana Yordan¹, Dian Susanti²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan masalah belum optimalnya penertiban bangunan dan pemukiman liar Bogor khususnya di Bantaran Kali Baru di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Masalah tersebut dihubungkan dengan salah satu variabel Koordinasi yang diasumsikan dapat memiliki hubungan dengan Efektivitas Penertiban bangunan dan Pemukiman Liar. Untuk menganalisis masalah penelitian ini digunakan teori sebagai alat analisis yaitu syarat-syarat koordinasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasibuan (2008 : 88) yang terdiri dari: koordinasi melalui perasaan untuk bekerja sama, koordinasi melalui persaingan, koordinasi melalui semangat tim, dan koordinasi melalui saling menghormati. Adapun teori efektivitas digunakan teori dari Steers (1985:4-7) yang terdiri Paham terhadap optimalisasi tujuan, perspektif sistematika, dan tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif (*explanatory survai method*) sedangkan sumber pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik pengumpulan data mempergunakan angket, observasi, dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana (*Simple Random Sampling*). Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah Regresi Linier Sederhana

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara Koordinasi terhadap Efektivitas Penertiban Bangunan dan Pemukiman Liar (Studi Kasus di Bantaran Kali Baru Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor). Dengan demikian hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini teruji secara empirik.

Kata kunci: Koordinasi, Efektifitas, Bangunan dan Pemukiman Liar

Kata Kunci: Koordinasi, Efektivitas Penertiban Bangunan Liar

ABSTRACT

This research was motivated by the problem of not yet optimal control of buildings and wild settlements in Bogor, especially in the Kali Baru River in Cibinong Sub-District, Bogor Regency. This problem is related to one of the Coordination variables which is assumed to have a relationship with the Effectiveness of Building Control and Illegal Settlement. To analyze the problem of this research, theory is used as an analytical tool, namely coordination requirements, as stated by Hasibuan (2008: 88) which consists of:

coordination through feeling to work together, coordination through competition, coordination through team spirit, and coordination through mutual respect. The effectiveness theory is used by the theory of Steers (1985: 4-7) which consists of understanding the optimization of goals, systematic perspectives, and pressure in terms of human behavior in the organizational structure.

The method used in this research is explanatory survey method (explanatory survey method) while the source of data collection uses library research and field studies with data collection techniques using questionnaires, observations, and interviews. The sampling technique used is a simple random sampling. The data analysis technique used is Simple Linear Regression.

Based on the results of data processing carried out the results of the research showed that there was a positive and significant relationship between Coordination of the Effectiveness of Building Control and Illegal Settlements (Case Study in the Bantaran Baru District of Cibinong District, Bogor Regency). Thus the hypothesis proposed in this study is empirically tested.

Keywords: *Coordination, Effectiveness, Building and Wild Settlements*

pemukiman. Pemukim membangun rumah seadanya

1. PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bogor adalah persoalan banyaknya lahan milik Pemerintah daerah Kabupaten Bogor yang terabaikan seperti sarana umum terutama pada jalur-jalur penghijauan yang dibiarkan kosong. Hal tersebut dapat memicu adanya pelaku ekonomi untuk menyalahgunakan menempati lahan jalur-jalur penghijauan sebagai tempat bangunan dan pemukiman liar.

Bangunan dan Pemukiman liar atau yang biasa di sebut dengan bangunan yang berdiri tanpa izin adalah bangunan yang didirikan secara tidak sah (tanpa memperoleh izin membangun atau yang didirikan di atas tanah bukan milik sendiri). Bangunan dan Pemukiman liar dapat dijumpai di tanah-tanah negara yang kosong atau bangunan-bangunan yang terbengkalai dan dibiarkan tak bertuan, di bawah jalan layang atau di taman-taman kota. Akhir-akhir ini bahkan banyak dijumpai di lokasi

sebagai tempat berlindung, yang tentunya merusak pemandangan dan keindahan kota. Keberadaan mereka di sana terutama karena kota dianggap mudah untuk mengakses pekerjaan dan mereka tetap bertahan sepanjang tidak ada pelaksanaan penggusuran.

Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun kepentingan horizontal antara masyarakat dengan masyarakat.

Untuk terciptanya ketertiban umum di Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, yang secara garis besar telah mengatur mengenai kebijakan pemerintah daerah untuk mengawasi, mencegah dan menindak segala bentuk kegiatan penyalahgunaan sarana sosial, sarana umum, dan fasilitas milik pemerintah daerah serta permukiman sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, keteraturan kehidupan pada masyarakat.

Kecamatan Cibinong salah satu kecamatan yang termasuk kedalam wilayah Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk 318.022 Ribu Jiwa, penduduk yang menempati Kecamatan Cibinong kebanyakan pendatang dari Suku Jawa, bahkan di Kecamatan Cibinong populasi orang Jawa mencapai 32%. Banyaknya jumlah penduduk di Kecamatan Cibinong, banyak pula permasalahan yang di hadapi Pemerintah Kecamatan Cibinong. Permasalahan yang muncul selain oleh pertumbuhan penduduk secara alamiah juga banyaknya pemukiman liar yang dihuni masyarakat pendatang yang memanfaatkan lahan penghijauan seperti daerah pinggir sungai untuk membangun tempat usaha (PKL). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan masyarakat pendatang

membeli lahan untuk dijadikan tempat tinggal yang pada akhirnya masyarakat mendirikan bangunan menempel ke bibir sungai bahkan hingga di atas sungai. tanpa memikirkan keberlangsungan hidup mereka yang membutuhkan beberapa sarana dan prasarana penunjang seperti kebutuhan akan air bersih, penerangan dan lain sebagainya yang pada akhirnya bukan saja melakukan pelanggaran membangun dilahan yang bukan peruntukannya bahkan merembet ke masalah lain pelanggaran terhadap sarana penunjang hidup mereka.

Langkah awal Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengatasi masalah bangunan dan pemukiman liar di Bantaran Kali Baru Kecamatan Cibinong, melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait antara lain: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, Dinas Keberihan dan Pertamanan, Dinas Binamarga dan Pengairan, Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, Aparat PLN, Dinas Perizinan Deperindag dan Dinas Pengaturan Lalu lintas Dan Angkutan Umum. Sedangkan dari unsur Aparat melibatkan Aparat Kepolisian daerah Cibinong dan Koramil untuk mengantisipasi adanya terjadinya bentrokan dengan masyarakat saat sedang berlangsungnya eksekusi bangunan dan pemukiman liar.

Dalam mewujudkan Kabupaten Bogor sebagai daerah bebas dari Pedagang Kaki lima (PKL) dan Bangunan Liar, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor sudah memberikan surat peringatan kepada para penghuni yang menempati bangunan liar di Bantaran Kali Baru Kecamatan Cibinong agar bangunannya di bongkar sendiri. tetapi sudah seminggu bangunan

tersebut masih digunakan untuk pemukiman dan berjualan bahkan sampai harus dibongkar paksa oleh petugas dan di relokasi ke tempat yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

Sekalipun Pemerintah Kabupaten Bogor sudah melakukan penertiban kepada para pemukiman liar di Bantaran Kali Baru Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, namun jelang beberapa bulan kemudian para penghuni tersebut kembali menempati lahan semula di sepanjang Bantaran Kali Baru Kecamatan Cibinong dengan alasan ditempat yang baru sepi pengunjung dan berkurangnya pendapatan mereka dari pendapatan yang sebelumnya.

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan, memperlihatkan bahwa penertiban bangunan dan pemukiman liar di sekitar Bantaran Kali Kecamatan Cibinong belum optimal, dimana masih ditemukan sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) bangunan dan pemukiman liar yang memanfaatkan lahan Penghijauan disepanjang Bantaran Kali Baru Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Data Bangunan dan Liar Di Bantaran Kali Baru Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor pada Tahun 2015 dimana seharusnya lahan tersebut diperuntukan untuk jalur penghijauan tetapi sudah berubah fungsi menjadi pemukiman liar yang dihuni masyarakat pendatang yang memanfaatkan lahan penghijauan untuk membangun tempat usaha.

Indikasi-indikasi belum optimalnya penertiban bangunan dan pemukiman liar di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor antara lain sebagai berikut :

1. Sasaran dan tujuan penertiban belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Contoh. Pada saat melakukan penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dalam penegakan Perda ada indikasi tebang pilih dalam melakukan tugasnya.
2. Kurang tegasnya aparat pelaksana dalam menindak masyarakat yang menempati lahan bukan peruntukannya.
3. Adanya oknum yang melindungi para pedagang/penghuni liar di Bantaran Kali Baru Kecamatan Cibinong.

Berdasarkan indikasi-indikasi di atas, belum optimalnya penertiban bangunan dan pemukiman liar di Bantaran Kali Baru Kecamatan Cibinong, asumsi peneliti disebabkan oleh beberapa faktor, namun dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk melakukan pendekatan analisis melalui variabel koordinasi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dengan instansi terkait dan berbagai komponen program. Dengan melaksanakan koordinasi secara terus menerus diharapkan dapat mengefektifkan Penertiban Bangunan dan Pemukiman Liar di Bantaran Kali Baru Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Hal tersebut senada dengan pendapat Stoner dan Freeman (2005:383), Koordinasi merupakan: "Proses pepaduan sasaran-sasaran dan kegiatan unit-unit (bagian-bagian atau bidang-bidang fungsional) yang terpisah pada sebuah organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi secara efisien".

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian koordinasi

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa :“Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”.

.Koordinasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan bersama seperti yang dimaksud diatas, untuk itu diperlukan syarat-syarat koordinasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasibun (2008:88) yaitu sebagai berikut :

a. *Sense of cooperation*

Syarat pertama dalam melakukan koordinasi berhubungan dengan sikap mental para pegawai, dalam melakukan koordinasi pegawai diwajibkan untuk memiliki perasaan saling memiliki artinya dalam satu situasi kerja dan satu tujuan bersama diperlukan rasa saling membantu satu dengan yang lainnya sehingga dengan adanya rasa tersebut akan timbul kebersamaan yang diwujudkan dalam bentuk kerja sama.

b. *Rivalry*

Koordinasi tidak hanya bersyaratkan atas adanya bentuk kerja sama akan tetapi dengan adanya koordinasi diperlukan persaingan yang sehat diantara bagian unit kerja, hal ini dapat menimbulkan semangat kerja yang tinggi dan untuk mencapai prestasi dalam persaingan kerja tersebut.

c. *Team Spirit*

Syarat koordinasi ketiga adalah adanya rasa menghargai antara unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lainnya. Dalam situasi kerja yang terbagi menjadi unit-unit bagian memiliki koridor tersendiri dan tujuan masing-masing yang pada dasarnya diperlukan untuk mencapai tujuan bersama, apabila salah satu unit belum mencapai tujuan dalam tujuan khusus unit tersebut, maka tidak berarti tujuan bersama telah tercapai, sehingga unit lainnya menghargai kinerja unit tersebut dan memberikan dukungan agar tujuan pada unit tersebut tercapai dengan baik untuk mencapai tujuan bersama dalam sistem kerja.

d. *Esprit de Corps*

Syarat koordinasi yang keempat adalah dampak yang diberikan dari syarat pertama sampai dengan syarat yang ketiga yaitu dengan adanya kerja sama dan rasa saling menghargai antar unit kerja, maka akan timbul semangat kerja yang tinggi pada setiap pegawainya.

Keterpaduan koordinasi yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja tentunya akan mendapat dampak yang positif terhadap hasil kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian pelaksanaan koordinasi yang dilaksanakan dengan memperhatikan metode-metode dalam pelaksanaan koordinasi diharapkan efektifitas penertiban bangunan liar dapat berjalan secara maksimal.

2.2 Pengertian Efektivitas

Konsep efektifitas bila dilihat dari berbagai sudut pandang disiplin ilmu, memiliki makna yang berbeda. Steers (1985:2005) mengemukakan pandangan sebagai berikut:

“Efektifitas itu sendiri paling baik dapat dimengerti jika dilihat dari sudut sejauh mana organisasi mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya alam dalam usahanya mengejar tujuan operasi dan tujuan operasional”.

Pengertian lain dari efektifitas menurut Dunn (2003:498) adalah “Suatu kriteria untuk menseleksi alternatif untuk dijadikan rekomendasi yang didasarkan pada pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksima, lepas dari pertimbangan efisiensi”.

Sedangkan efektifitas menurut E. Kast dalam Sugiono (2003:23) adalah “Efektifitas berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan baik secara implisit, yaitu seberapa jauh rencana dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan tercapai”.

Dengan demikian efektifitas sangat ditentukan oleh adanya sumber

daya yang baik, terutama menyangkut sumber daya manusia, yaitu ditingkat manajerial dan juga pelaksana. Disamping itu, berbagai sumber daya pendukung seperti organisasi dan fasilitas pendukung juga merupakan faktor yang penting dalam mendukung pencapaian efektifitas yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat di atas, suatu kegiatan dikatakan efektif bila hasilnya sesuai dengan sasaran dan mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Agar penertiban bangunan dan pemukiman liar yang dilaksanakan di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dapat berjalan dengan efektif, diperlukan tiga konsep efektifitas yang saling berhubungan seperti yang disampaikan Steers (1985:4-7) antara lain yaitu:

1. Paham mengenai optimasi tujuan: efektifitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai;
2. Perspektif sistematis: tujuan mengikuti suatu daur dalam organisasi;
3. Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi: bagaimana tingkah laku individu dan kelompok akhirnya dapat menyokong atau menghalangi tercapainya tujuan organisasi.

Orientasi dalam penelitian tentang efektifitas sebagian besar dan sedikit banyak pada akhirnya bertumpu pada

pencapaian tujuan. Mengacu pada teori pemecah masalah tersebut di atas, peneliti berharap bahwa dalam pelaksanaan penertiban bangunan dan pemukiman liar di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dapat menerapkan efektivitas melalui Optimalisasi tujuan, Perspektif Sistematis dan Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi sehingga pelaksanaan penertiban bangunan dan pemukiman liar dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut : “Besarnya Hubungan Antara Koordinasi Dengan Efektivitas Penertiban Bangunan dan Pemukiman Liar di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor”, ditentukan oleh pelaksanaan dimensi kesadaran untuk bekerjasama (*sense of cooperation*), Koordinasi melalui persaingan (*rivalry*), Melalui semangat tim (*team spirit*), Koordinasi melalui saling menghormati (*esprit de corps*).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode eksplanasi (*Explanatory Research*) yang dimana data informasi dapat dikumpulkan dari populasi, yang hasil datanyadikumpulkan dan dianalisis untuk dapat mengukur pengaruh dari satu variabel terhadap variabel lainnya. Sumber data yang digunakan oleh peneliti terbagi atas 2 (dua) sumber yaitu Sumber Data Sekunder dan Sumber Data Primer. Sedangkan Teknik Pengumpulan Data

yang digunakan adalah sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana (*Simple Random Sampling*). Untuk menguji hipotesis penelitian yang diajukan, digunakan teknik analisa data “Regresi Linier Sederhana”. Digunakan variabel-variabel penelitian mempunyai skala pengukuran ordinal yang bertujuan mencari hubungan antara Koordinasi dengan Efektivitas Penertiban Bangunan Dan Pemukiman Liar (Studi Di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk dapat mengetahui Hubungan antara Variabel Koordinasi Dengan Efektivitas Penertiban Bangunan Dan Pemukiman Liar, akan dilakukan perhitungan statistik dengan mempergunakan Software SPSS (*Statistical Product Service Solution*) Versi 21 yang mengambil data dari jawaban responden. Adapun langkah-langkah perhitungannya sebagai berikut :

4.1 Analisis Persamaan Regresi Linear Sederhana

Analisis Regresi Linear Sederhana dilakukan untuk mengetahui perubahan variabel bebas dalam hal ini adalah Variabel Koordinasi memiliki hubungan variabel tidak bebas dengan Variabel Efektivitas Penertiban Bangunan Dan Pemukiman Liar. Adapun hasil perhitungan persamaan Regresi Linear Sederhana dengan menggunakan SPSS V.21 yang terdapat pada tabel 4.4 adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.1
Analisis Persamaan Regresi Linear Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,239	1,709		5,405	,000
Koordinasi	,460	,044	,784	10,552	,000

a. Dependent Variable: Efektivitas Penertiban Bangunan Dan Pemukiman

Liar

Berdasarkan dari tabel 4.4 di atas akan dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 9,239 + 0,460X$$

Dimana :X = Variabel Koordinasi

Y = Efektivitas Penertiban Bangunan Dan Pemukiman Liar

Persamaan Regresi tersebut memperlihatkan bahwa apabila Koordinasi terjadi kenaikan satu satuan, maka Efektivitas Penertiban Bangunan

Dan Pemukiman Liar akan terjadi kenaikan sebesar 0,460 satuan. Kemudian konstanta yang bernilai 9,239 menunjukkan bahwa apabila tidak terjadi perubahan terhadap variabel Koordinasi maka Variabel Efektivitas Penertiban Bangunan Dan Pemukiman Liar akan berubah sebesar 9,239 satuan.

4.2 Perhitungan Korelasi

Untuk mengetahui nilai r adalah nilai korelasi atau hubungan antar variabel, nilai korelasi tersebut dapat diperoleh pada tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Nilai Korelasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,784 ^a	,614	,608	3,04717

Hipotesis tersebut di atas akan dibuktikan dengan menghitung distribusi student (uji t) yang kemudian akan dibandingkan dengan t-tabel. Hasil perhitungan tersebut adalah sebagai berikut :

$$t = rs \sqrt{\frac{N-2}{1-rs^2}}$$

$$t = 0,784 \sqrt{\frac{72-2}{1-0,784^2}}$$

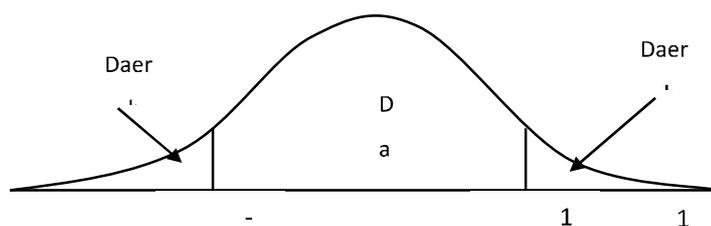
$$t = 10,552$$

Hasil perhitungan tersebut akan dibandingkan dengan t_{tabel} , dimana dari hasil tabel distribusi t dengan tingkat kekeliruan sebesar 0,05 didapatkan t_{tabel} adalah sebesar 1,9944. Ini menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} yaitu sebesar 10,552

lebih besar daripada nilai t_{tabel} yaitu sebesar 1,9944 yang dapat digambarkan dalam kurva distribusi normal t pada gambar 4.3 sebagai berikut :

Gambar 4.3

Kurva Penerimaan H_a dan Penolakan H_a



Berdasarkan gambar 4.3 di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 10,552 berada pada daerah penerimaan H_a , artinya bahwa t_{tabel} lebih besar dari t_{hitung} , atau H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Koordinasi Dengan Efektivitas Penertiban Bangunan Dan Pemukiman Liar.

4.4. Pembahasan

Pelaksanaan Koordinasi dalam Penertiban Bangunan dan Pemukiman Liar di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dilakukan sesuai Hasibuan (2008:88) mengemukakan bahwa dalam prosesnya koordinasi dapat dibentuk dalam 4 (empat) dimensi yakni : koordinasi melalui *Sense of cooperation* (perasaan untuk bekerja sama), koordinasi melalui *Rivalry* (persaingan), koordinasi melalui *Team spirit* (semangat tim), dan koordinasi melalui *Esprit de corps* (saling menghormati) tersebut dapat dilihat dari hasil penyebaran kuisioner

atau angket yang kemudian disajikan dalam bentuk angka presentase serta didukung oleh wawancara dan pengamatan penelitian di lapangan yang terdiri dari beberapa dimensi koordinasi yang akan dipaparkan.

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis yang diajukan diketahui bahwa variabel koordinasi berkorelasi dengan efektivitas Penertiban Bangunan dan Pemukiman Liar di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor sebesar 0,784, Pengaruh yang ditimbulkan bersifat signifikan yang berarti bahwa pada taraf kepercayaan 0,1 % atau 99 % dari hasil penelitian kebenarannya dapat ditolerir.

Hal ini mengindikasikan bahwa koordinasi berhubungan terhadap efektivitas Penertiban Bangunan dan Pemukiman Liar di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Mengacu pada hasil pengujian tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin dipenuhi unsur unsur variabel koordinasi maka semakin

meningkat pula efektivitas Penertiban Bangunan dan Pemukiman Liar di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Berdasarkan hasil observasi, menunjukkan bahwa Aparat Dinas Satpol PP dengan Aparat instansi lain harus bekerja saling menghargai dengan instansi lain dalam penyelenggaraan penertiban bangunan dan pemukiman liar di bantaran kali baru Kecamatan Cibinong untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penertiban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan penertiban Satpol PP kerap di benturkan dengan oknum-oknum petugas, sehingga diperlukan kerjasama yang baik dengan instansi lain.

Koordinasi melalui persaingan (*Rivalry*) Berdasarkan hasil observasi, menunjukkan bahwa Aparat Dinas Satpol PP sebelum melakukan tindakan penertiban bangunan dan pemukiman liar di bantaran kali baru Kecamatan Cibinong terlebih dahulu Dinas Satpol PP melalui rapat koordinasi membuat kesepakatan dengan instansi terkait untuk terselenggaranya Rencana Penertiban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, menyebutkan bahwa dalam rangka menertibkan bangunan dan hunian liar di bantaran kali baru Kecamatan Cibinong terlebih dahulu Dinas Satpol PP Kabupaten Bogor membuat kesepakatan dengan instansi terkait untuk mengetahui kekuatan personil dan untuk melakukan pemetaan kegiatan sesuai tupoksi masing-masing.

Koordinasi melalui semangat Tim (*Team Spirit*) berdasarkan hasil

observasi, menunjukkan bahwa Aparat Dinas Satpol PP dalam rangka penertiban bangunan dan pemukiman liar di bantaran kali baru Kecamatan Cibinong, Aparat Satpol PP pada saat bekerja kurang saling mendukung satu sama lain dilapangan terkadang para petugas suka membawa egonya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, menyebutkan bahwa Aparat Satpol PP bekerja menggunakan aturan / kebijakan Pemerintah Daerah sehingga setiap langkah yang dibuat akan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain sehingga tercipta kesamaan visi dan misi dalam menjalankan Pemerintahan di segala bidang.

Koordinasi saling menghormati (*esprit de corps*) berdasarkan hasil observasi, menunjukkan bahwa Aparat Dinas Satpol PP dalam melakukan penertiban komunikasi antar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan instansi terkait, terkadang kurang, karena masing-masing suka membawa Ego sektoral dimana keberhasilan Satpol PP juga merupakan keberhasilan semua dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bogor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, menyebutkan bahwa pada saat melaksanakan penertiban kami antar sesama instansi harus selalu menjaga komunikasi supaya terjalin dengan baik, karena kami Aparat Dinas Satpol PP tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari instansi maupun pihak lain.

Koordinasi melalui semangat Tim (*Team Spirit*) berdasarkan hasil

observasi, menunjukkan bahwa Aparat Dinas Satpol PP dalam rangka penertiban bangunan dan pemukiman liar di bantaran kali baru Kecamatan Cibinong, Aparat Satpol PP pada saat bekerja kurang saling mendukung satu sama lain dilapangan terkadang para petugas suka membawa egonya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, menyebutkan bahwa Aparat Satpol PP bekerja menggunakan aturan / kebijakan Pemerintah Daerah sehingga setiap langkah yang dibuat akan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain sehingga tercipta kesamaan visi dan misi dalam menjalankan Pemerintahan di segala bidang.

Berdasarkan hasil pengujian, terdapat variabel-variabel lain yang berhubungan dengan Efektivitas Penertiban Bangunan dan Pemukiman Liar di Bantaran Kali Baru Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat variabel lain selain variabel koordinasi yang cukup besar pengaruhnya dan belum dikaji pada penelitian ini.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil perhitungan Analisis Regresi Linear Sederhana, didapatkan hasil sebesar 0,784, yang menyatakan bahwa ada Hubungan Antara Koordinasi Dengan Efektivitas Penertiban Bangunan Dan Pemukiman Liar. yaitu setiap kenaikan satu-satuan nilai pada variabel Koordinasi (X) maka, variabel Penertiban Bangunan dan Pemukiman Liar (Y) akan naik sebesar 0,784.

Berdasarkan hasil *Analisis Korelasi pearson product moment*, didapatkan hasil sebesar 0,784., nilai tersebut berada pada interval skor 0,60 – 0,799 memiliki hubungan yang kuat, dikarenakan korelasi atau hubungan tersebut memiliki nilai positif yang menunjukkan searah, dapat disimpulkan bahwa semakin baik Hubungan maka Penertiban Bangunan dan Pemukiman Liar akan semakin efektif.

Berdasarkan hasil *Pengujian Hipotesis*, didapatkan hasil nilai T_{hitung} sebesar 10,552, selanjutnya nilai T_{hitung} dibandingkan dengan nilai T_{tabel} yaitu sebesar 1,9944, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, dengan demikian dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara Koordinasi dengan Efektivitas Penertiban Bangunan dan Pemukiman Liar di Bantaran kali Baru Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian mengenai Koordinasi dengan Efektivitas Penertiban Bangunan Liar di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Disarankan kepada aparat Dinas Satpol PP Kabupaten Bogor untuk lebih meningkatkan kerjasama tidak saja dengan beberapa SKPD tetapi bekerjasama dengan masyarakat di Wilayah Bantaran Kali Baru Kecamatan Cibinong agar pelaksanaan penertiban bisa berjalan lancar dan kondusif.
2. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor pemberlakuan sanksi administrasi ditegakan agar para pelaku maupun masyarakat

yang sudah ditertibkan atau direlokasi tidak kembali ketempat semula.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Alih Bahasa oleh Samoedra Wibawa, Diah Asitadani, Agus Heruanto Adna, dan Erwan Agus Purwanto). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hasibuan SP, Malayu. 2006. *Manajemen (dasar, pengertian, dan masalah)*. Jakarta : Bumi Aksara.

Steers, M Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.

Dokumen dan Lain-lain

- Republik Indonesia, Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor. Nomor 4 Tahun 2015, tentang: *Ketertiban Umum*.
- Badan Pusat Statistik, Kabupaten Bogor 2015, *Data dan Informasi Luas Wilayah Kabupaten Bogor 2014 - 2015*, Buku I: Kabupaten Bogor. BPS